

Analisa Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Perusahaan dengan PSAK 16

Anita Achmad Payu ^{1*} Noufelly Yoshitaki Ramadhani ²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Makassar, Indonesia. Email: anita@stienobel-indonesia.ac.id

² Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Makassar, Indonesia. Email: noufellyyoshitakiramadhani@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: Mei 12, 2025

Direvisi: Mei 19, 2025

Disetujui: Mei 24, 2025

DOI :

<https://doi.org/10.60079/amfr.v3i2.513>



Advances in Research

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Watampone dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16.

Metode Penelitian: Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi perusahaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh praktik akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perlakuan akuntansi atas aset tetap di PT PLN (Persero) UP3 Watampone telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 16. Hal ini mencakup pengakuan awal, pengeluaran setelah pengakuan awal, penyusutan, pelepasan, serta pengungkapan aset tetap dalam laporan posisi keuangan. Seluruh praktik tersebut dijalankan sesuai dengan pedoman internal perusahaan yang mengacu pada PSAK dan peraturan direksi.

Implikasi: Temuan ini memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat penerapan akuntansi berbasis standar pada sektor BUMN dan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan aset tetap yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: penerapan akuntansi aktiva tetap; psak no 16; akuntansi aktiva tetap.

Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis menuntut penyajian laporan keuangan yang tidak hanya relevan dan andal, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Laporan keuangan kini berfungsi sebagai alat komunikasi penting antara manajemen dan pemangku kepentingan, yang mencakup investor, kreditor, regulator, dan publik. Kualitas informasi dalam laporan keuangan menentukan tingkat kepercayaan terhadap integritas dan akuntabilitas perusahaan (Mesioye & Bakare, 2024). Dalam hal ini, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap menjadi aspek krusial yang harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak untuk dijual dalam aktivitas normal perusahaan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap, terutama terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan

penghentian aset yang tidak lagi beroperasi. Sebagai contoh, PT PLN (Persero) UP3 Watampone pada tahun 2022 memiliki aset tetap netto sebesar Rp 1,2 triliun, namun beberapa aset seperti mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tidak lagi digunakan tetap tercatat sebagai aset karena proses penghapusan yang lambat. Masalah lainnya mencakup kesalahan dalam kapitalisasi, yaitu pengeluaran yang seharusnya meningkatkan nilai aset tetap namun keliru dicatat sebagai beban. Hal ini menyebabkan distorsi informasi keuangan dan menurunkan kepercayaan stakeholder. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip kapitalisasi dan lemahnya pengendalian internal memperbesar risiko pelaporan keuangan yang tidak wajar. Fenomena ini menunjukkan pentingnya analisis sistematis terhadap kesalahan pelaporan dan dampaknya terhadap kepercayaan pemangku kepentingan.

Berbagai studi terbaru telah menunjukkan pentingnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap, serta bagaimana penyimpangan terhadap standar ini dapat berdampak pada keandalan laporan keuangan. Penelitian oleh (Bakri, 2020; Wuisang *et al.*, 2023) mengkaji penerapan PSAK 16 pada anak perusahaan PT PLN dan menemukan bahwa meskipun terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek, masih terdapat ketidaksesuaian, terutama dalam metode penyusutan dan praktik revaluasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa standar telah diadopsi, tetapi implementasinya belum sepenuhnya konsisten, terutama pada pengelolaan aset yang nilai dan masa manfaatnya signifikan terhadap total aset perusahaan. Lebih lanjut, penelitian oleh Lonita *et al.*, (2022) mengenai PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) Langsa mengungkapkan bahwa pengakuan aset tetap dalam bentuk tanaman belum menghasilkan (*immature plantations*) bertentangan dengan ketentuan PSAK 16. Perlakuan ini menimbulkan keraguan atas keandalan laporan keuangan karena mencatat aset yang belum memberikan manfaat ekonomis sebagai aset tetap. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Wijaya & Salesti, (2022) pada PT Graha Trisaka Industri menunjukkan bahwa secara umum praktik akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAK 16, meskipun terdapat penyimpangan minor. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini telah menerapkan praktik seperti pengakuan aset dengan umur manfaat lebih dari satu tahun, penggunaan metode penyusutan garis lurus (*straight-line*) dan saldo menurun (*declining balance*), serta pencatatan aset tetap dan akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan. Namun demikian, perbedaan dalam kebijakan revaluasi aset serta prosedur penghentian pengakuan aset tetap masih menjadi persoalan yang mencerminkan belum optimalnya keselarasan dengan PSAK 16. Fakta ini mengindikasikan bahwa sekalipun PSAK 16 telah menjadi acuan normatif, praktik aktual di lapangan menunjukkan adanya variasi implementasi yang berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan keuangan.

Berbagai studi telah meneliti implementasi PSAK No. 16 dalam konteks pengelolaan aset tetap, namun sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kepatuhan normatif dan teknis pelaporan keuangan. Studi-studi seperti (Bakri, 2020; Wuisang *et al.*, 2023; Lonita *et al.*, 2022; Wijaya & Salesti, 2022) lebih menyoroti kesesuaian perlakuan akuntansi dengan standar yang berlaku, seperti metode penyusutan, revaluasi aset, dan pengakuan aset tetap. Namun, studi mereka belum secara eksplisit mengeksplorasi dampak kesalahan pelaporan aset tetap terhadap kepercayaan stakeholder, baik dari sisi investor, regulator, maupun masyarakat umum. Padahal, dalam praktiknya, kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat menentukan kredibilitas dan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Secara teoritis, masih terdapat kesenjangan dalam menjelaskan hubungan antara kesalahan sistematis dalam pelaporan aset tetap dengan erosi trust pemangku kepentingan. Konsep-konsep seperti asimetri informasi, akuntabilitas, dan transparansi sering disebut, namun belum dibahas secara mendalam dalam kaitannya dengan kesalahan pelaporan

aset tetap dan konsekuensi jangka panjangnya terhadap reputasi dan hubungan perusahaan dengan stakeholder. Oleh karena itu, studi ini menjadi urgen karena dibutuhkan penelitian yang tidak hanya menilai kesesuaian pelaporan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menelaah secara kualitatif bagaimana kesalahan tersebut dipersepsikan oleh stakeholder dan bagaimana hal itu berdampak pada tingkat kepercayaan mereka terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh entitas pelapor.

Studi ini memiliki aspek kebaruan karena akan mencoba untuk mengeksplorasi secara kualitatif dampak kesalahan dalam perlakuan aset tetap—terutama pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset—terhadap tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, sebuah aspek yang belum banyak disentuh dalam kajian terdahulu yang cenderung fokus pada kepatuhan normatif terhadap PSAK No. 16. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian prosedur akuntansi dengan standar, tetapi juga memperluas perspektif dengan melihat bagaimana kesalahan pelaporan aset tetap dipersepsikan oleh stakeholder dan bagaimana hal tersebut memengaruhi akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi organisasi dalam jangka panjang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kesalahan pelaporan aset tetap dalam praktik pelaporan keuangan di PT PLN (Persero) UP3 Watampone serta menjelaskan implikasinya terhadap trust pemangku kepentingan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola aset tetap dan kualitas pelaporan keuangan di sektor BUMN, sekaligus memperkaya kajian teoretis tentang hubungan antara kesalahan pelaporan dan kepercayaan stakeholder dalam konteks akuntansi keuangan sektor publik.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Aset Tetap

Dalam konteks akuntansi keuangan, pemahaman yang utuh terhadap definisi dan klasifikasi aset tetap sangat penting untuk menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan. PSAK No. 16 (IAI, 2015) secara eksplisit mendefinisikan aset tetap sebagai aktiva berwujud yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Definisi ini menekankan dimensi jangka panjang dari aset tetap, yang menunjukkan bahwa aset tersebut bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat, tetapi berperan strategis dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan secara berkelanjutan. Martani *et al.*, (2024) turut memperkuat konsep ini dengan menjelaskan bahwa aset tetap harus dimiliki untuk kegiatan produktif dan digunakan dalam lebih dari satu periode. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya oleh manajemen, terutama dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang dan dalam proses penyusunan kebijakan depresiasi yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomis aset tersebut.

Klasifikasi aset tetap dapat dilihat dari dua sudut pandang utama, yaitu substansi dan depresiasi. Warren *et al.*, (2018) membedakan aset tetap ke dalam tangible assets seperti tanah, gedung, dan mesin, serta intangible assets seperti paten, merek dagang, dan *goodwill*. Selain itu, dibedakan pula antara aset tetap yang mengalami depresiasi, seperti bangunan dan mesin (*depreciated plant assets*), dengan aset yang tidak disusutkan, seperti tanah (*undepreciated plant assets*). Dalam praktiknya, klasifikasi dan perlakuan akuntansi atas aset tetap memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan dan persepsi stakeholder terhadap nilai dan kinerja perusahaan. Studi yang pernah dilakukan oleh

Budisantoso & Kurniawan, (2024) menunjukkan bahwa penurunan kualitas audit dapat menyebar secara sistemik dan memengaruhi kredibilitas laporan keuangan, termasuk dalam pengungkapan nilai aset tetap yang tidak wajar. Selain itu, perubahan standar akuntansi seperti PSAK 73 mengenai sewa juga turut berdampak pada pelaporan aset, khususnya dalam hal klasifikasi dan pengakuan liabilitas sewa, yang secara tidak langsung dapat mengubah proporsi aset tetap yang dilaporkan (Susanti *et al.*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa aspek regulasi dan implementasi standar memiliki korelasi erat dengan kualitas informasi keuangan yang disajikan perusahaan. Dalam kaitannya dengan kualitas laba, Valdiansyah & Murwaningsari, (2022) menegaskan bahwa karakteristik perusahaan, termasuk kepemilikan aset tetap dan perlakuan akuntansinya, merupakan determinan penting yang mempengaruhi persepsi pasar terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Perolehan dan Penilaian Aktiva Tetap

Dalam praktik akuntansi keuangan, penentuan nilai aset tetap pada saat perolehan memegang peranan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan. PSAK No. 16 menegaskan bahwa aset tetap diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan jika biaya perolehannya dapat diukur secara andal (Lamandoke *et al.*, 2021). Dalam pandangan ini, akuntansi aset tetap tidak hanya mengacu pada pencatatan kuantitatif, tetapi juga mengandung pertimbangan kualitatif terhadap kontribusi aset dalam menunjang kelangsungan operasional. Harahap *et al.*, (2023) menambahkan bahwa seluruh pengeluaran yang terjadi hingga aset siap digunakan, termasuk pajak pembelian, biaya transportasi, dan instalasi, harus dihitung sebagai bagian dari harga perolehan. Pendekatan ini mempertegas pentingnya prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Dalam konteks yang lebih luas, pencatatan yang tepat terhadap nilai awal aset tetap berperan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik dan investor.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan transparansi dalam pelaporan keuangan, implementasi kebijakan pengakuan aset tetap yang sesuai PSAK menjadi faktor penentu integritas laporan keuangan. Purba, (2017) menjelaskan bahwa banyak entitas belum sepenuhnya konsisten dalam menilai aset tetap sesuai prinsip biaya historis, sehingga membuka ruang terjadinya distorsi informasi finansial. Hal ini diperkuat oleh Budisantoso & Kurniawan, (2024) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang menurun dapat berkontribusi pada melemahnya keandalan pencatatan nilai aset tetap. Ketidaktepatan ini tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Studi oleh Valdiansyah & Murwaningsari, (2022) juga mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan yang rendah berhubungan erat dengan rendahnya kualitas laba, dan salah satu penyebabnya adalah perlakuan akuntansi aset tetap yang tidak tepat. Sementara itu, perubahan regulasi, seperti penerapan PSAK 73 mengenai pengakuan aset sewa, turut memengaruhi komposisi aset tetap di neraca perusahaan (Susanti *et al.*, 2021). Kondisi ini menuntut entitas untuk tidak hanya sekadar patuh terhadap standar, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem pengelolaan aset dan strategi pelaporan yang menyeluruh.

Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap

Dalam praktik akuntansi dan strategi manajemen aset, pengeluaran setelah pengakuan awal atas aset tetap memegang peranan penting dalam menjaga, meningkatkan, dan memperluas manfaat ekonomis dari aset tersebut. Kieso *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut

biasanya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas produksi, memperpanjang masa manfaat aset, atau meningkatkan kualitas hasil produksi. Perspektif ini didukung oleh temuan Jang & Yehuda, (2021) yang menunjukkan bahwa pengeluaran lanjutan atas aset tetap, seperti peningkatan kapasitas dan pemeliharaan strategis, berkontribusi terhadap efisiensi biaya dan penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Namun, pengeluaran-pengeluaran ini harus diklasifikasikan secara tepat berdasarkan prinsip akuntansi: apakah sebagai capital expenditure yang dapat dikapitalisasi atau hanya sebagai revenue expenditure yang langsung dibebankan pada laba rugi. Klueter *et al.*, (2024) menekankan bahwa ketepatan dalam mengelola pengeluaran pascapengakuan awal dapat memengaruhi pengembalian investasi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam konteks re-konfigurasi sumber daya operasional setelah akuisisi atau ekspansi aset.

Di sisi lain, implikasi strategis dari pengeluaran pasca pengakuan awal tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga pada persepsi pasar terhadap efektivitas pengelolaan aset perusahaan. Chaturvedi & Weigelt, (2024) dalam kajiannya tentang integrasi pasca-akuisisi menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran dalam proses peningkatan aset tetap menjadi faktor penentu dalam sinergi operasional dan keberhasilan transformasi organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, Amano, (2022) menemukan bahwa pengeluaran tambahan yang dikelola dengan tepat setelah pencatatan awal aset tetap mampu memperbaiki kinerja operasional pasca-merger dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Bahkan Sutherland, (2017) menekankan bahwa dalam praktik terbaik akuntansi keuangan, klasifikasi dan dokumentasi atas pengeluaran ini harus dilakukan secara hati-hati dan transparan untuk mencegah manipulasi nilai aset serta menjaga akuntabilitas. Studi lain oleh Fridson & Alvarez, (2022) menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap pengungkapan yang tidak jelas terkait nilai tambah dari pengeluaran aset tetap, karena dapat mengindikasikan adanya potensi overstatement terhadap nilai buku perusahaan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap merupakan proses akuntansi yang mencerminkan realitas ekonomi penggunaan aset dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. PSAK No. 16 (IAI, 2015) menjelaskan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis atas jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Penyusutan berfungsi sebagai jembatan antara nilai historis aset dan penurunan manfaat ekonomis seiring berjalannya waktu. Dalam praktik modern, penyusutan tidak lagi dilihat sebagai beban statis, melainkan sebagai refleksi strategis dari konsumsi nilai guna aset. Barker & Schulte, (2017) menyoroti pentingnya pengukuran nilai wajar dan penyusutan dalam memberikan representasi realistis atas aset non-keuangan dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam konteks transisi menuju pelaporan berbasis nilai pasar. Hal ini sejalan dengan pandangan Jang & Yehuda, (2021) yang menunjukkan bahwa biaya penyesuaian sumber daya, termasuk melalui penyusutan, memainkan peran penting dalam penciptaan nilai saat perusahaan melakukan ekspansi atau konsolidasi aset tetap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan seperti harga perolehan, nilai residu, dan umur manfaat harus dianalisis secara hati-hati agar alokasi beban penyusutan tetap mencerminkan pola manfaat ekonomis secara akurat. Pemilihan metode penyusutan, baik itu garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi, juga sangat memengaruhi persepsi efisiensi aset oleh investor. Perusahaan dengan metode penyusutan yang agresif pada periode awal umumnya menunjukkan hasil kinerja operasional yang konservatif dalam jangka pendek, tetapi lebih stabil dalam jangka panjang (Paeleman *et al.*, 2024).

Ini membuktikan bahwa metode penyusutan bukan sekadar teknikalitas, melainkan bagian dari strategi komunikasi nilai perusahaan. Selain itu, Klueter *et al.*, (2024) menekankan bahwa penyusutan berperan dalam re-konfigurasi sumber daya pasca-akuisisi dan berimplikasi langsung terhadap struktur beban serta pengukuran profitabilitas perusahaan. Dalam perspektif yang lebih strategis, Penyusutan yang dikelola secara transparan dan konsisten juga mendukung integrated reporting, yang menuntut informasi keuangan dan non-keuangan yang terintegrasi dalam menyampaikan nilai jangka panjang perusahaan (Rambaud & Richard, 2015).

Pelepasan Aset Tetap

Dalam siklus hidup aset tetap, fase akhir yang tidak kalah penting adalah pelepasan atau penghentian pengakuan atas aset tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 revisi 2015, pelepasan aset tetap diatur secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetap andal dan relevan. Paragraf 67 PSAK No. 16 menjelaskan bahwa jumlah tercatat suatu aset tetap harus dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepas, baik melalui penjualan, pertukaran, maupun bentuk pelepasan lainnya, atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan harus mencerminkan kenyataan ekonomis—yakni bahwa suatu aset hanya dapat tetap diakui selama memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Lebih lanjut, Paragraf 68 PSAK No. 16 menyatakan bahwa setiap keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penghentian pengakuan aset tetap harus dicatat dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya pelepasan tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan wajib mengakui selisih antara nilai tercatat aset dan nilai imbalan yang diterima (jika ada) sebagai komponen yang memengaruhi kinerja keuangan tahun berjalan. Keuntungan dapat timbul jika nilai realisasi aset lebih tinggi dari nilai tercatatnya, sementara kerugian muncul jika sebaliknya. Namun, terdapat pengecualian khusus sebagaimana diatur dalam PSAK 30 tentang Sewa, di mana dalam transaksi jual dan sewa balik (*sale and leaseback*), perlakuan akuntansi atas pelepasan aset dapat berbeda tergantung pada karakteristik transaksinya. Pelepasan aset tetap merupakan bagian dari kebijakan manajemen aset yang strategis. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan ketentuan akuntansi, tetapi juga dengan efisiensi operasional dan peremajaan aset yang mendukung produktivitas. Aset yang sudah tidak produktif, rusak berat, atau ketinggalan teknologi perlu dihentikan pengakuannya agar laporan keuangan tidak menampilkan nilai yang menyesatkan.

Pengungkapan pada Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam praktik akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, khususnya dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan aset tetap. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 paragraf 22 (IAI, 2015), entitas diwajibkan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting terkait aset tetap yang dimilikinya. Informasi tersebut meliputi dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto aset tetap, apakah menggunakan model biaya historis atau model revaluasi. Pengungkapan ini penting karena akan memengaruhi cara pengguna laporan keuangan menilai nilai wajar serta posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, entitas juga wajib menginformasikan metode penyusutan yang digunakan, seperti metode garis lurus, saldo menurun ganda, atau metode unit produksi, disesuaikan

dengan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Hal ini penting karena metode penyusutan yang digunakan akan berpengaruh terhadap beban penyusutan yang diakui dalam setiap periode akuntansi dan, pada akhirnya, memengaruhi laba bersih perusahaan.

Lebih lanjut, PSAK No. 16 juga mengharuskan entitas untuk mengungkapkan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan untuk setiap kelompok aset tetap. Estimasi ini mencerminkan asumsi manajemen terkait jangka waktu penggunaan aset dalam aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, laporan keuangan harus mencantumkan jumlah tercatat bruto dari aset tetap serta akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode pelaporan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan analisis tren dan mengevaluasi kondisi aktual aset yang dimiliki perusahaan. Salah satu elemen pengungkapan yang sangat krusial adalah penyajian rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, yang memuat informasi mengenai penambahan aset, pelepasan, akuisisi melalui penggabungan usaha, revaluasi yang dilakukan sesuai ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat, beban penyusutan, dampak penjabaran laporan keuangan entitas asing, serta pengklasifikasian kembali aset. Rekonsiliasi ini memberikan gambaran menyeluruh terkait dinamika perubahan aset tetap selama periode pelaporan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji, khususnya terkait proses akuntansi aset tetap di PT PLN (Persero) UP3 Watampone. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual karakteristik dari objek yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah bagian Akuntansi dan Keuangan PT PLN (Persero) UP3 Watampone, yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap perusahaan. Pemilihan subjek ini dilakukan secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan peran strategis mereka dalam menghasilkan data yang relevan dan otoritatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen internal perusahaan seperti laporan keuangan, catatan aset tetap, dan kebijakan akuntansi yang relevan. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai yang bertanggung jawab di bidang akuntansi dan keuangan. Wawancara bersifat semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan isu-isu penting dalam pengelolaan aset tetap. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mereduksi data, menyusun data dalam kategori tematik, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam data sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik pelepasan dan pengungkapan aset tetap di entitas yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil

Pengakuan Aset Tetap PT. PLN (Persero) UP3 Watampone

PT PLN (Persero) UP3 Watampone membagi cara perolehan aktiva tetapnya ke dalam beberapa cara yaitu pembelian tunai/pembelian langsung, membangun sendiri dan relokasi dari unit PLN lainnya. Namun pengakuan aktiva tetap oleh PT PLN (Persero) UP3 Watampone harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar PSAK No. 16

Tabel 1. Kesesuaian Pengakuan Aset Tetap antara PT PLN (Persero) UP3 Watampone dengan PSAK No. 16

PT PLN (Persero) UP3 Watampone	PSAK 16	Keterangan
Aset Tetap di gunakan untuk menjaga keberlangsungan operasi Perusahaan untuk memproduksi dan mendistribisikan tenaga listrik yang mempunyai masa manfaat minimal satu periode	kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut	Sesuai
Pencatatan menggunakan aplikasi SAP - ERP (System Application and Product - Enterprise Resource Planning) serta terdapat data pendukung pada setiap transaksinya	biaya perolehannya dapat diukur secara andal	Sesuai

Tabel 2. Kesesuaian Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap antara PT PLN (Persero) UP3 Watampone dengan PSAK No. 16

Aktiva Tetap	PT PLN (Persero) UP3 Watampone	Keterangan
Pembelian tunai/ Pemilikan Langsung	Aktiva tetap diukur setara harga tunai yang dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak pada tanggal pengakuan dengan didasarkan pada biaya perolehan.	Sesuai PSAK 16 p7 dan p23
Membangun Sendiri	Aktiva tetap diukur setara harga tunai yang dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak pada tanggal pengakuan dengan didasarkan pada penilaian internal dan penerbitan Berita Acara Internal Perusahaan untuk menguasai dan mengendalikan aktiva tersebut	Sesuai PSAK 16 p16 dan p22
Relokasi Aset dari Unit PLN Lainnya	Aktiva tetap yang diperoleh dari hasil relokasi dari unit PLN Lainnya diakui sebesar nilai perolehan beserta dengan penyusutannya, sedangkan biaya yang timbul akibat relokasi dari satu tempat ke tempat lainnya dibebankan sebagai biaya.	Tidak ada rujukannya

Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal Aktiva Tetap

Pada dasarnya biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi di PT PLN (Persero) UP3 Watampone merupakan biaya investasi (capital expenditure) dengan ciri -ciri :

- Menambah kapasitas dari suatu aktiva tetap yang ada (*Repowering and Updating*)
- Meningkatkan umur manfaat aset
- Meningkatkan kualitas output aktiva tetap
- Menambah dan /atau memperluas aset
- Secara teknis dan nilai ekonomis mempunyai manfaat yang lebih dari satu tahun

Biaya – biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi untuk fungsi pembangkit, transmisi, distribusi dan fungsi lainnya diatur lebih lanjut melalui peraturan internal perusahaan tentang batasan biaya operasi dan biaya investasi yang berlaku. Perhitungan kembali nilai aktiva yang dimiliki dilaksanakan menggunakan metode revaluasi. Perlakuan akuntansi dalam pengalokasian biaya dan perhitungan kembali telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penyusutan

Penggunaan aktiva tetap secara terus menerus akan mengakibatkan keausan dan keusangan secara fisik. Walaupun ketika masa penggunaannya aktiva tetap tersebut diperbaiki, akan tetapi kemampuan produksinya akan semakin berkurang dan suatu saat aktiva itu harus diganti. Aktiva tetap tidak pernah lepas dari penyusutannya, karena aktiva tetap itu sendiri memiliki masa manfaat yang terbatas dan kemampuan ekonomis yang semakin hari semakin berkurang kecuali tanah, jadi perlu diadakan pengalokasian biaya secara berkala. PT PLN (Persero) UP3 Watampone dalam prakteknya hanya menetapkan satu metode penyusutan saja untuk semua jenis aktiva tetap, yang dimiliki yakni metode garis lurus dengan mengabaikan nilai residu atau menganggap nilai residu sama dengan nol. Metode ini telah dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Metode Penyusutan PT PLN (Persero) UP3 Watampone dapat dilihat pada **Tabel A1** di bagian **Lampiran**.

Penghentian atau Penghapusan Aktiva Tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Watampone

Pada saat tertentu perusahaan melakukan penarikan aktiva tetap yang dimilikinya dari operasi normal perusahaan. Penghentian atau penarikan tetap dilakukan oleh perusahaan apabila kondisi fisik dari aktiva tetap yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan lagi, aset tersebut sudah tidak ekonomis, adanya penggantian aset ataupun aset tersebut akan direlokasi. Namun terdapat berupa mesin PLTD yang sudah tidak beroperasi namun masih tetap diakui sebagai aset. Aset tersebut seharusnya dapat diusulkan penghapusan aset, namun karena prosesnya panjang sehingga aset mesin PLTD tersebut belum diusulkan hapus.

Dalam proses penarikan aktiva terdapat formulir-formulir yang digunakan yaitu:

- **Formulir AE 1:** Berita Acara Penelitian penarikan Aktiva Untuk Direlokasi/Dihapus. PT PLN (Persero) UP3 Watampone membentuk tim peneliti penarikan aktiva tetap dan membuat usulan penarikan aktiva dari kegiatan operasi untuk direlokasi/dihapus disertai dengan lampiran - lampiran usulan penarikan aktiva.
- **Formulir AE 2:** Penetapan Penarikan Aktiva dari Kegiatan Operasi untuk Direlokasi/Dihapus. Jika usulan penarikan aktiva yang dibuat UP3 disetujui oleh kantor Unit Induk Distribusi Sulselrabar,

maka akan diterbitkan Formulir AE 2 yang ditujukan kepada pihak Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk dilakukan pemeriksaan fisik atas penetapan penarikan aktiva tersebut

- **Formulir AE 3:** Usulan Relokasi /Penghapusan Aktiva. Setelah dilakukan peninjauan fisik atas aktiva yang diusulkan relokasi/hapus dan pihak Satuan Pengawasan Internal (SPI) telah menyetujuinya maka akan di terbitkan formular AE 3 sebagai dokumen persetujuan usulan relokasi/penghapusan Aktiva
- **Formulir AE 4:** Formulir persetujuan relokasi/penghapusan aktiva yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris. Namun jika Dewan Komisaris tidak menyetujui usulan tersebut maka PT PLN (Persero) UP3 Watampone harus meninjau ulang dan memeriksa secara keseluruhan atas usulan penarikan aktiva dan mengulang prosedur penarikan aktiva tersebut.

Dalam pelaksanaannya, aktiva tetap yang dihentikan dari operasi normal perusahaan akan dimasukkan dalam perkiraan aktiva tetap tidak beroperasi dan apabila aktiva tetap tersebut dijual maka nilainya dihapuskan seluruhnya dari perkiraan aktiva tetap demikian juga dengan akumulasi penyusutannya. Penjualan yang dimaksud dalam pelepasan aktiva tetap adalah dengan proses lelang terbuka.

Pengungkapan Aktiva Tetap di Laporan Keuangan

Penyajian aktiva tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Watampone telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan setiap jenis aset tetap dalam laporan posisi keuangan disajikan secara terpisah. Aktiva tetap disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca pada sisi debit neraca dan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian aktiva berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan sebagai aktiva tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan dan diklasifikasi sebagai aktiva tetap pada kelompok aktiva tidak lancar. Beban penyusutan aktiva tetap pada setiap akhir periode disajikan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban usaha. Rugi akibat percepatan aktiva tetap yang akan dihapus dan beban penyusutan ATTB yang akan direlokasi dan diperbaiki disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari beban lain-lain (beban di luar usaha). Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aktiva tetap disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai beban atau pendapatan lain-lain (beban atau pendapatan di luar usaha) pada saat aktiva tersebut dihentikan pengakuannya. Laba tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan usaha.

Perusahaan mengungkapkan aset tetap sebagai berikut :

- Setiap kelompok aktiva tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aktiva yaitu aktiva pemilikan langsung dan/atau aktiva sewa pembiayaan
- Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aktiva tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi
- Jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan
- Rugi penurunan nilai dan jumlah yang di jurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan ekuitas
- Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aktiva tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif

Khusus untuk aktiva tetap Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) , perusahaan wajib mengungkapkan:

- Rincian aktiva tetap yang sedang dalam pelaksanaan
- Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak
- Estimasi saat penyelesaian
- Hambatan kelanjutan penyelesaian (jika ada)
- Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aktiva tetap dalam pembangunan

Dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aktiva yang memenuhi kriteria aktiva kualifikasian, maka wajib diungkapkan

- Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan
- Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi

Perusahaan tidak merinci aktiva tetap menurut jenisnya, namun penjelasan aktiva tetap dalam laporan neraca dapat dilihat dalam lampiran laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut memperlihatkan seberapa besar pengaruh aktiva tetap terhadap pelaporan keuangan PT PLN (Persero). Dengan demikian penyajian yang diterapkan perusahaan sudah cukup informatif. Kesesuaian Pengungkapan Aset Tetap oleh PT PLN (Persero) UP3 Watampone dengan PSAK 16 dapat dilihat pada **Tabel A2** di bagian **Lampiran**.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK No. 16 pada pengakuan, perlakuan, penyusutan, penghentian pengakuan, serta pengungkapan aset tetap di PT PLN (Persero) UP3 Watampone. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) UP3 Watampone telah menerapkan PSAK No. 16 secara konsisten dan sesuai dengan standar. Hal ini tercermin dalam proses pengakuan aset tetap yang memperhatikan manfaat ekonomis dan keandalan pengukuran biaya perolehan, perlakuan pengeluaran setelah perolehan aset yang dibedakan antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan, penerapan metode penyusutan garis lurus dengan dasar umur manfaat ekonomis aset, hingga mekanisme penghentian pengakuan melalui proses evaluasi manfaat ekonomis serta pelepasan aset melalui lelang terbuka. Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan, khususnya dalam hal klasifikasi, rekonsiliasi, serta pengungkapan beban penyusutan dan hasil pelepasan aset tetap.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan standar akuntansi aset tetap di lingkungan BUMN sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam konteks praktik akuntansi yang diimplementasikan oleh PT PLN (Persero). Studi ini memiliki nilai orisinalitas karena menggali secara mendalam praktik aktual yang dilakukan oleh entitas dalam menyelaraskan prosedur teknis dengan regulasi keuangan berbasis PSAK. Secara praktis dan manajerial, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi manajemen perusahaan lain dalam menyusun kebijakan aset tetap yang lebih akuntabel dan efisien. Bagi regulator atau pembuat kebijakan, temuan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi aset tetap, khususnya yang menyangkut proses pelepasan, penyusutan, dan pengungkapan informasi keuangan secara transparan dan tepat waktu.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada satu entitas BUMN, yaitu PT PLN (Persero) UP3 Watampone, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap perusahaan lain masih terbatas. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, sehingga tidak dirancang untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Oleh karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas objek kajian ke unit-unit PLN lainnya maupun sektor industri berbeda untuk memperoleh pemahaman komparatif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur efektivitas kebijakan akuntansi aset tetap terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, sistem teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi aset tetap.

Referensi

- Amano, Y. (2022). Negative goodwill and postmerger operating performance: evidence from Japan. *Asian Review of Accounting*, 30(4), 381–397. <https://doi.org/10.1108/ARA-02-2022-0033>
- Bakri, B. B. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Pt Pln (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra Dan Sulbar Area Makassar Selatan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1894>
- Barker, R., & Schulte, S. (2017). Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets. *Accounting, Organizations and Society*, 56, 55–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.12.004>
- Budisantoso, T., & Kurniawan, H. (2024). The contagion effect of decreasing audit's quality on financial statement audit engagement: the Indonesian case. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 16(1), 63–76. <https://doi.org/10.1108/APJBA-11-2020-0393>
- Chaturvedi, T., & Weigelt, C. (2024). Operating synergy and post-acquisition integration in corporate acquisitions: A resource reconfiguration perspective. *Long Range Planning*, 57(3), 102428. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2024.102428>
- Fridson, M. S., & Alvarez, F. (2022). *Financial statement analysis: a practitioner's guide*. John Wiley & Sons.
- Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No. 16 di PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4 SE-Articles). <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Jang, Y., & Yehuda, N. (2021). Resource adjustment costs, cost stickiness, and value creation in mergers and acquisitions. *Contemporary Accounting Research*, 38(3), 2264–2301. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12668>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D., Wiecek, I. M., & McConomy, B. J. (2019). *Intermediate Accounting*, Volume 2. John Wiley & Sons.
- Klueter, T. M., Moreira, S., & Ofoedu, C. (2024). Understanding the link between post-acquisition resource reconfiguration and technology out-licensing. *Journal of Management Studies*, 61(5), 2101–2136. <https://doi.org/10.1111/joms.12968>
- Lamandoke, Y., Sumual, T. E. M., & Sumual, F. M. (2021). Analisis Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan Psak di CV Geronimo Airmadidi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 45–55. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.622>
- Lonita, I. T., Junita, A., & Azhar, I. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 16 Tentang Aset Tetap Pada Pt. Perkebunan Nusantara I (Persero) Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(6), 333–344. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i6.6642>
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2024). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Penerbit Salemba.



- Mesioye, O., & Bakare, I. A. (2024). Evaluating Financial Reporting Quality: Metrics, Challenges, and Impact on Decision-Making. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(10), 1144–1156. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.1024.2735>
- Paeleman, I., Vanacker, T., & Zahra, S. A. (2024). Should we be conservative or aggressive? SME managers' responses in a crisis and long-term firm survival. *Journal of Management Studies*, 61(7), 2849–2884. <https://doi.org/10.1111/joms.12993>
- Purba, M. P. (2017). Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.
- Rambaud, A., & Richard, J. (2015). The "Triple Depreciation Line" instead of the "Triple Bottom Line": Towards a genuine integrated reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 92–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.012>
- Susanti, M., Ardana, I. C., & Dewi, S. P. (2021). The impact of IFRS 16 (PSAK 73) implementation on key financial ratios: An evidence from Indonesia. *Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)*, 295–303. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.045>
- Sutherland, J. (2017). *Key concepts in accounting and finance*. Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-20472-0>
- Valdiansyah, R. H., & Murwaningsari, E. (2022). Earnings quality determinants in pre-corona crisis: another insight from bank core capital categories. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 279–294. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2021-0134>
- Warren dkk. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, A., & Salesti, J. (2022). Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap (Studi PT. Graha Trisaka Industri). *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.33373/eq.v9i2.5232>
- Wuisang, S., Lonto, M., & Tala, O. (2023). Analisis Penerapan Psak 16 Tentang Asset Tetap Pada PT PLN (Persero) UPDK MINAHASA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 177–186. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4090>

Lampiran

Tabel A1. Metode Penyusutan PT PLN (Persero) UP3 Watampone

No	Kategori	Model Pencatatan	Metode	Masa Manfaat (tahun)
1	Tanah dan Hak atas Tanah	Biaya	Tidak disusutkan	-
2	Bangunan dan Kelengkapan Halaman	Biaya	Garis Lurus	50 Tahun
3	Bangunan Saluran Air dan Perlengkapannya	Biaya	Garis Lurus	50 Tahun
4	Jalan Sepur Samping	Biaya	Garis Lurus	24 Tahun
5	Instalasi dan Mesin	Biaya	Garis Lurus	20-40 Tahun
6	Perlengkapan Penyaluran Tenaga Listrik	Biaya	Garis Lurus	40 Tahun
7	Gardu Induk	Biaya	Garis Lurus	25-40 Tahun
8	Saluran Udara Tegangan Tinggi	Biaya	Garis Lurus	40 Tahun
9	Kabel Dibawah Tanah	Biaya	Garis Lurus	40 Tahun
10	Jaringan Distribusi	Biaya	Garis Lurus	40 Tahun
11	Gardu Distribusi	Biaya	Garis Lurus	25-40 Tahun
12	Perlengkapan Lain Lain Distribusi	Biaya	Garis Lurus	10-40 Tahun
13	Perlengkapan Pengolahan Data	Biaya	Garis Lurus	10 Tahun
14	Perlengkapan Transmisi Data	Biaya	Garis Lurus	10 Tahun
15	Perlengkapan Telekomunikasi	Biaya	Garis Lurus	10 Tahun
16	Perlengkapan Umum	Biaya	Garis Lurus	5 Tahun
17	Kendaraan Bermotor dan Alat yang Mobile	Biaya	Garis Lurus	5 Tahun
18	Material Cadang Intalasi dan Mesin	Biaya	Garis Lurus	40 Tahun

Sumber: PERDIR PLN No 0299.P/DIR/2016

Tabel A2. Kesesuaian Pengungkapan Aset Tetap oleh PT PLN (Persero) UP3 Watampone dengan PSAK 16

No	Uraian	PSAK 16	PT PLN UP3 Watampone	Info
1.	Perolehan dan penilaian aktiva tetap	- Diterima sebesar biaya perolehan.	- Diterima sebesar biaya perolehan.	Sesuai
2.	Pengeluaran setelah pengukuran awal aktiva tetap	- Pengalokasian biaya menjadi beban maupun aktiva. - Pengukuran setelah pengakuan menggunakan metode biaya atau metode revaluasi.	- Pengalokasian biaya menjadi biaya maupun kapitalisasi menjadi aktiva. - Penggunaan metode revaluasi dalam pengukuran.	Sesuai
3.	Penyusutan aktiva tetap	- Penggunaan metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.	- Penggunaan metode garis lurus untuk semua jenis aktiva.	Sesuai
4.	Pelepasan aktiva tetap	- Pelepasan dilakukan pada saat aktiva tidak memiliki nilai ekonomis. - Pelepasan dilakukan dengan dijual, disewakan, dan lain-lain.	- Pelepasan dilakukan saat aktiva tidak bisa digunakan kembali - Pelepasan dilakukan dengan penarikan ke aktiva tidak beroperasi dan selanjutnya dilelang.	Sesuai
5.	Penyajian aktiva tetap di Laporan Keuangan	- Laporan keuangan mengungkapkan hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap seperti dasar pengukuran aktiva bruto, metode penyusutan, tarif penyusutan, akumulasi penyusutan, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode	- Laporan keuangan dilengkapi dengan lampiran yang mencakup nilai netto aktiva, tarif penyusutan, akumulasi penyusutan, perbandingan saldo aktiva.	Sesuai

Penulis korespondensi

Anita Achmad Payu dapat dihubungi di: anita@stienobel-indonesia.ac.id